

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terjadi perubahan sebutan atau istilah, seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD, Red) berubah menjadi organisasi Perangkat Daerah (OPD, Red). Pembentukan organisasi perangkat daerah yang berupa Dinas atau Badan diklasifikasikan berdasarkan Tipe A (beban kerja yang besar), Tipe B (beban kerja yang sedang) dan Tipe C (beban kerja yang kecil).

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di tetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan aapemerintah, peraturan daerah mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah. Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Kecurangan atau biasa disebut dengan *fraud* yang biasanya terjadi pada suatu instansi keuangan. Kecurangan pada laporan adalah salah satu masalah utama pada dunia ekonomi terutama pada keuangan. Pengendalian internal pada laporan keuangan semakin diragukan karena laporan keuangan dapat diandalkan dan disiapkan sesuai dengan semua ketentuan peraturan dan etika dari laporan akuntan dan auditor. Dalam kondisi ekonomi saat ini penyebab kecurangan menggunakan metode yang berbeda untuk mengukur aset dan liabilitas. Maka, peningkatan kualitas laporan keuangan yang merupakan sumber dasar untuk keuangan perusahaan dan hasil analisis terus terhubung dengan efisiensi aset dan kewajiban. Terjadinya kecurangan ini dapat meresahkan masyarakat karena dapat mengalami kerugian yang sangat besar atau kecil. Sebagai contoh, kasus penggelapan uang biasanya sering terjadi pada bagian keuangan terutama dalam hal pembelanjaan ataupun yang lain, untuk dapat melakukan kecurangan itu mereka biasanya menaikkan harga semula untuk lebih tinggi agar mendapatkan keuntungan. Faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan yaitu karena lemahnya struktur organisasi dan kurang efektifnya kinerja auditor internal.

Salah satu faktor yang menjadi kunci dalam pencegahan kecurangan adalah pengawasan. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 7 tahun 2008, pengawasan terhadap pemerintah desa adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah desa berjalan secara efisiensi dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan. Pengawasan pelaksanaan UU desa berdasarkan pasal 112 UU 2014 No. 6 ada di tangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah

kabupaten / kota dan kecamatan. Pemerintah provinsi akan membina dan mengawasi administrasi dan pencairan dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan dari pajak dan retribusi dari kabupaten / kota ke desa.

Di pemerintahan, ada fungsi auditor yang bertugas mengawasi administrasi pemerintah termasuk penggunaan anggaran. Auditor adalah salah satu jenis akuntan pemerintah. Peran auditor dalam era implementasi UU desa sangat besar karena fungsi pengawasan, terutama pengawasan pelaksanaan anggaran, akan menentukan apakah anggaran tersebut digunakan secara tepat untuk memberdayakan masyarakat pedesaan. Dengan adanya auditor diharapkan dapat mengurangi kecurangan yang terjadi pada suatu perusahaan. Auditor juga harus dapat meneliti dengan baik agar mendapatkan data yang benar dan akurat.

Di Indonesia ada auditor eksternal dan internal pemerintah. Auditor eksternal pemerintah adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), sedangkan auditor internal pemerintah adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan inspektorat. Sedangkan kinerja inspektorat dalam melakukan tindakan pencegahan untuk mencegah kecurangan finansial kurang berhasil.

Kurang efektifnya kinerja auditor biasanya kurang mampu dalam bidang auditor dan kurang teliti dalam melihat laporan keuangan yang belum mampu di fungsikan dengan baik. Dengan demikian, dapat terjadinya kurang efektifnya kinerja auditor karena pegawai yang pintar dalam memanipulasi data dan auditor kurang teliti maka akan terjadinya kecurangan. Dalam instansi terdapat aturan yang menjadi dasar perilaku dibuat untuk mencegah terjadinya penyimpangan

dapat merugikan instansi. Salah satu aturan dalam organisasi adalah aturan akuntansi. Aturan akuntansi mengatur tentang pelaporan keuangan berpedoman pada PSAK yang dikeluarkan IAI. Suatu aturan untuk dapat menjaga keandalan informasi menghindari tindakan kriminal yang dapat merugikan instansi.

Pengendalian intern ada lima komponen utama antara lain : pengendalian lingkungan, penilaian resiko, prosedur kontrol, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. pengendalian lingkungan merupakan pengendalian lingkungan perusahaan apakah pada lingkungan perusahaan sangat bagus dan cocok. Penilaian resiko merupakan peran sangat penting dalam perusahaan karena penilaian resiko dapat mengetahui seberapa besar resiko pada perusahaan yang terjadi. Prosedur kontrol merupakan pengendalian pada perusahaan yang berperan untuk dapat mengetahui tentang perusahaan. Informasi dan komunikasi dalam pengendalian intern sangat penting karena informasi dan komunikasi merupakan penghubung antar sesama pegawai satu dengan yang lain, jika komunikasi dan informasi tidak sesuai maka dapat menyebabkan terjadinya kecurangan karena adanya kesalahpahaman antar pegawai satu dengan yang lain. Pemantauan pada pengendalian intern untuk memantau laporan keuangan yang di buat oleh pegawai/staff pada bidang akuntansi terutama pada laporan pemasukan dan pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selain lima komponen utama dari pengendalian intern namun terdapat tiga komponen yang dapat ditambahkan antara lain:

- a. penetapan tujuan yang yaitu manajemen perusahaan harus memilih tujuan, yang akan sesuai dengan strategi dan misi perusahaan, serta tingkat resiko yang akan diambil organisasi.
- b. Mendefinisikan peristiwa yaitu mengidentifikasi peristiwa potensial yang dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan dalam mengimplementasikan strategi dan mencapai target potensial. Peristiwa yang mengarah pada konsekuensi negatif potensial adalah resiko yang harus dievaluasi oleh manajemen.
- c. Respon terhadap resiko merupakan manajemen perusahaan dapat mengambil resiko tertentu, menolaknya atau melakukan diversifikasi.

Faktor lain yang dapat membatasi pengendalian intern kas adalah biaya pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut. Meskipun hubungan antara manfaat-biaya merupakan kriteria utama yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan pengendalian intern. Pengukuran tepat biaya dan manfaat umum tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, manajemen melakukan estimasi kualitatif dan kuantitatif serta pertimbangan dalam menilai hubungan biaya-manfaat tersebut.

Adanya asimetri informasi memungkinkan adanya konflik yang terjadi antara kepala bagian dan pegawai untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan sendiri. Menurut, Eisenhardt (1989) mengemukakan tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu :Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), Manusia memiliki daya piker terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), Manusia selalu menghindari resiko (risk adverse).

Instansi terdapat aturan menjadi dasar perilaku yang dibuat untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan instansi. Salah satu aturan dalam organisasi adalah aturan akuntansi. Aturan akuntansi ini mengatur tentang pelaporan keuangan yang berpedoman pada PSAK yang dikeluarkan IAI. Suatu aturan untuk dapat menjaga keandalan informasi dan menghindari tindakan kriminal yang dapat merugikan instansi.

Ketaatan aturan akuntansi sangat penting untuk instansi karena suatu aturan akan dapat mempengaruhi instansi untuk lebih baik. Jika tidak ada aturan maka akan terjadi suatu kecurangan yang dapat merugikan perusahaan. Baik buruknya perusahaan dapat diukur dengan ketaatan akuntansi dan pengendalian intern instansi. Jika salah satu tidak dilakukan dengan sebaik mungkin akan dapat mempengaruhi instansi tersebut.

Bagus (2017) Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Perilaku tidak etis merupakan perilaku yang menyalahgunakan kedudukan/posisi, dan perilaku yang tidak berbuat apa-apa. Perilaku tidak etis itu kecurangan sebagai kesenjangan integritas pribadi pegawai atau penalaran moral yang lain. Dalam perusahaan banyak pegawai yang menyalahgunakan kedudukan untuk melakukan kecurangan dan dapat lemahnya pengendalian intern kas pada perusahaan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kecurangan. Sedangkan menurut Silvia (2018) dengan hasil penelitian perilaku tidak etis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang menyimpang dari tujuan utama yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang terlebih dahulu yaitu menurut Wiwik (2017) dengan hasil penelitian pengendalian intern kas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi, asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi, ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan menurut silvia (2018) dengan hasil penelitian pengendalian intern berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Wiwik (2017) yang terletak pada variabel independen untuk memperluas penelitian dengan menambah variabel independen yaitu perilaku tidak etis sesuai dengan peneliti Wiwik (2017). Alasan penelitian ini menambah variabel yaitu apabila dalam penelitian ini ditambah variabel independen perilaku tidak etis salah satu faktor yang mempengaruhi kecurangan.

Kecurangan biasanya terjadi karena adanya perilaku tidak etis dalam perusahaan yang menyalahgunakan kedudukan. Dengan pertimbangan tersebut dan semakin banyaknya kasus kecurangan yang terjadi dapat menyebabkan sebuah perusahaan, maka pentingnya dilakukan penelitian kecurangan akuntansi untuk dapat mengetahui faktor apa yang mempengaruhi perusahaan melakukan kecurangan. Walaupun perusahaan itu sudah beberapa tahun namun di Indonesia belum terdapat kajian teoritis dan empiris secara komprehensif. Dengan demikian, kasus ini tidak cukup dikaji oleh ilmu akuntansi tetapi memerlukan kedisiplinan ilmu yang lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil judul **“PENGARUH PENGENDALIAN INTERN KAS, ASIMETRI INFORMASI, KETAATAN ATURAN AKUNTANSI, DAN PERILAKU TIDAK ETIS TERHADAP KECURANGAN AKUNTANSI (*FRAUD*) PADA OPD DI KABUPATEN DEMAK”**

1.2. Rumusan Masalah

Dalam kecurangan akuntansi pada OPD, dari beberapa penelitian salah satu faktor yang mempengaruhi antara lain oleh Bagus (2017) Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap terhadap kecendrungan kecurangan (*fraud*). Wiwik (2017) dengan hasil penelitian pengendalian intern kas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi, asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi, ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif dan signifikan. Mendasarkan hal tersebut maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kecurangan (*fraud*)?
- 2) Apakah asimetri informasi berpengaruh signifikan terhadap kecurangan (*fraud*)?
- 3) Apakah ketaatan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kecurangan (*fraud*)?
- 4) Apakah perilaku tidak etis berpengaruh signifikan terhadap kecurangan (*fraud*)?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris:

- 1) Untuk menguji pengendalian intern kas terhadap kecurangan (*fraud*)
- 2) Untuk menguji asimetri informasi terhadap kecurangan (*fraud*)
- 3) Untuk menguji ketaatan akuntansi terhadap kecurangan (*fraud*)
- 4) Untuk menguji perilaku tidak etis terhadap kecurangan (*fraud*)

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan untuk dapat mencapai tujuan yang dicapai tersebut dan dapat memberikan manfaat positif bagi:

1.4.1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang baru dalam ilmu akuntansi khususnya dalam bidang kecurangan (*fraud*) akuntansi pada Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) yang dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya yang relevan.

1.4.2. Aspek Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian mendatang mengenai pengaruh pengendalian intern kas, asimetri informasi, ketaatan aturan akuntansi, dan perilaku tidak etis terhadap kecurangan akuntansi pada UPK. Serta dapat untuk meminimalkan kecurangan yang ada pada suatu lembaga dengan mempertimbangkan faktor faktor yang mempengaruhinya.